



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Untuk membantu peneliti dalam mengkaji teori yang akan dipakai dan juga proses penelitian, peneliti meninjau dua penelitian terdahulu yang membahas mengulas tentang pemaknaan khalayak terhadap suatu isu atau fenomena. Dua penelitian yang ditinjau merujuk pada teknik analisis yang sama yaitu analisis resepsi Stuart Hall dengan basis teori pengodean (*encoding*) dan penafsiran (*decoding*) yang sama.

Penelitian pertama yang peneliti tinjau adalah penelitian seorang mahasiswa dari Universitas Multimedia Nusantara, Ignatius Felix Suryadi, yang berjudul “Pemaknaan Khalayak Terhadap Transgender (Studi Resepsi terhadap Program Acara “YKS” Trans TV)”. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berifat deskriptif, dengan paradigma konstruktif. Penelitian ini menggunakan kerangka konsep teori resepsi dan metode analisis resepsi Stuart Hall. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sejumlah informan yang dipilih masuk kedalam posisi dominan, posisi negosiasi, dan posisi oposisi. Berdasarkan hasil tersebut pemahaman mengenai transgender dalam acara YKS dipengaruhi oleh pengalaman religius informan, pengetahuan informan mengenai Hak Asasi Manusia dan pengalaman informan terhadap sosok transgender.

Untuk penelitian kedua, peneliti juga meninjau hasil penelitian dari mahasiswa UMN lainnya yaitu Ricky Halim, dengan penelitian yang berjudul “Resepsi Aktif Audiens Media Sosial Youtube (Studi Kasus Terhadap Audiens Tayangan Video Youtube Reza 'Arap' Oktovian)”. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan menggunakan metode studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam terhadap enam khalayak aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keenam khalayak aktif berada dalam posisi oposisi terkait video Reza Oktovian. Khalayak menunjukkan penolakan terhadap penggunaan bahasa Reza Oktavian yang kasar yang dapat memberikan dampak buruk terhadap masyarakat.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

JUDUL	Pemaknaan Khalayak Terhadap Transgender (Studi Resepsi terhadap Program Acara “YKS” Trans TV)	Resepsi Aktif Audiens Media Sosial Youtube (Studi Kasus Terhadap Audiens Tayangan Video Youtube Reza 'Arap' Oktovian)	Pemaknaan Khalayak Terhadap Transgender: Analisis Resepsi Pada Film Dokumenter “Bulu Mata”
JENIS PENELITIAN	Kualitatif Deskriptif dengan paradigma penelitian konstruktivistik	Kualitatif Deskriptif dengan paradigma penelitian konstruktivistik	Kualitatif Deskriptif dengan paradigma penelitian konstruktivistik
METODE	Analisis Resepsi Stuart Hall	Studi Kasus Model Robert E. Stake	Analisis Resepsi Stuart Hall
TEKNIK PENGUMPULAN DATA	Wawancara mendalam dengan lima khalayak aktif dengan tingkatan pendidikan dan pekerjaan yang berbeda-beda (lulusan SD, pelajar SMA, mahasiswa)	Wawancara enam informan yang sudah pernah menonton video Youtube Reza Oktavian dan Reza Oktaviannya itu sendiri	Wawancara mendalam dengan enam informan yang sudah menonton film dokumenter “Bulu Mata” dan Tonny Trimarsanto selaku sutradara film Bulu Mata.

	S1, tim kreatif dan produse YKS)		
HASIL PENELITIAN	Sejumlah informan masuk kedalam posisi dominan, posisi negosiasi, dan posisi oposisi. Pemahaman mereka mengenai transgender dalam acara YKS dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pengalaman religius, informasi mengenai HAM, dan pengalaman akan transgender itu sendiri.	Khalayak aktif berada dalam posisi oposisi terkait video Reza Oktovian dikarenakan oleh aspek bahasa yang dibawakan oleh Reza Oktovian mengalami penolakan oleh khalayak aktif dan juga memberikan dampak buruk terhadap masyarakat.	-

Kedua penelitian terdahulu ini memiliki kesamaan dalam pembahasan yaitu mengenai resepsi audiens terhadap suatu fenomena atau isu tertentu. Penelitian Ignatius Felix Suryadi dan Ricky Halim menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, dengan paradigma penelitian konstruktivistik, begitu juga dengan peneliti. Namun untuk metode, penelitian Ricky Halim menggunakan metode Studi Kasus Model Robert E. Stake, berbeda dengan Ignatius Felix Suryadi yang menggunakan analisis resepsi Stuart Hall. Perbedaan lainnya adalah kedua penelitian ini menggunakan objek penelitian yang berbeda, dimana penelitian Ignatius Felix Suryadi menggunakan media televisi sedangkan Ricky Halim menggunakan media sosial *Youtube*.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Film Dokumenter

Film menurut Pramaggiore dan Wallis (2008) adalah “suatu karya seni kompleks yang memanfaatkan perkembangan teknologi

fotografi, rekaman suara, elektronik, dan *digital imaging*” (p. 2). Film juga mempunyai fungsi sebagai penyampai pesan secara eksplisit maupun implisit yang sangat berpengaruh bagi para penontonnya. Seperti halnya yang juga disebutkan dalam UU RI no. 30 tahun 2009 tentang perfilman, yakni menjelaskan film sebagai ‘karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.’

Janowitz mendefinisikan komunikasi massa sebagai suatu proses yang terdiri atas lembaga dan teknik dari kelompok tertentu yang menyebar luaskan pesan dan konten-konten simbolis kepada masyarakat luas yang heterogen, dengan menggunakan media massa seperti pers, radio, film, dan sebagainya (dikutip dalam McQuail, 2011, p. 62). Film mampu memberikan dampak yang kuat dan efektif ke masyarakat karena sifatnya yang audio visual, sesuai dengan sifat dari komunikasi massa. Film juga menyampaikan pesan dan makna secara satu arah ke khalayak luas.

Dalam sejarah film itu sendiri, muncul beberapa elemen penting yaitu propaganda, kemudian munculnya beberapa sekolah seni film dan jenis film dokumenter. Film dokumenter sendiri terbilang berbeda dari film kebanyakan karena memiliki unsur realis yang kuat, juga memiliki daya tarik lebih untuk kelompok minoritas (McQuail, 2011, p. 35). Istilah film dokumenter sampai saat ini belum memiliki

definisi yang pasti karena masih sering diperdebatkan. Hal ini dikarenakan begitu banyak sineas dokumenter yang memiliki pandangan berbeda dalam menjelaskan film dokumenter. Namun, film dokumenter itu sendiri dapat dikategorikan sebagai film non-fiksi. Istilah dokumenter untuk film non-fiksi ini pertama kali dicetuskan oleh John Grierson, seorang sineas dokumenter asal Inggris yang menganut aliran kontemporer dalam karya film dokumenternya. Grierson mengusulkan definisi film dokumenter sebagai sebuah ‘laporan aktual yang kreatif’ (*creative treatment of actuality*) (Ayawaila, 2017, p. 10-12).

Selain itu, film dokumenter disebut juga sebagai *film truth* atau film kebenaran. Istilah *film truth* digunakan oleh Dziga Vertov, seorang sineas asal Rusia, untuk judul film beritanya mengenai masyarakat Soviet, yang diterjemahkan dalam bahasa Perancis yaitu *kinopravda*. Vertov menjelaskan bahwa film kebenaran mengungkap realitas mengenai apa yang terjadi ketika orang berinteraksi di hadapan kamera, dalam artian, bagaimana pembuat film dan subjek berinteraksi dalam suatu hubungan, bagaimana mereka bertindak terhadap satu sama lain, bentuk kekuasaan dan kontrol apa yang berperan dalam pertemuan itu (Nichols, 2010, p. 184).

Berangkat dari kedua penjelasan diatas, Bill Nichols (2010) kemudian mengemukakan tiga asumsi untuk memahami lebih dalam tentang apa itu film dokumenter:

1. *“Film dokumenter adalah tentang realitas; mereka menceritakan tentang sesuatu yang benar-benar terjadi.”*

Maksud dari asumsi ini lebih kepada bagaimana film dokumenter menceritakan tentang situasi atau kejadian yang benar terjadi dan pernghormatan kepada fakta yang telah diketahui; film dokumenter tidak memperkenalkan sesuatu yang baru dan belum diverifikasi. Film dokumenter lebih membicarakan secara langsung mengenai sejarah bukan kisah kiasan.

2. *“Film dokumenter adalah tentang real people (orang-orang sesungguhnya).”*

Asumsi ini lebih kepada orang-orang sesungguhnya yang tidak berperan sebagai karakter lain tapi sebagai dirinya sendiri, yang pastinya terlibat langsung dalam situasi kejadian sebenarnya. Bukan semata-mata orang sesungguhnya seperti aktor dalam cerita fiksi yang memerankan sebuah karakter buatan yang bukan refleksi dari dirinya sendiri.

3. *“Film dokumenter menceritakan kisah tentang apa yang terjadi di dunia nyata.”*

Asumsi terakhir ini merujuk pada bagaimana film dokumenter menceritakan sebuah kisah, dimana kisah tersebut merupakan representasi sesungguhnya dari apa yang terjadi di dunia nyata daripada sebuah interpretasi imajinatif dari apa yang

kemungkinan terjadi di dunia nyata, seperti film fiksi (2010, p. 7-13).

Dokumenter kerap dipandang sebagai film yang menampilkan suatu kebenaran yang faktual dan natural (dalam artian tidak tersentuh elemen 'buatan' lain seperti halnya film fiksi), layaknya sebuah berita. Padahal nyatanya, film dokumenter tetap lah seperti film lainnya yang dibuat dengan berbagai elemen yang tidak natural; karena pada dasarnya dokumenter tidak hanya mengarahkan kamera langsung kepada kejadian nyata, merekamnya, dan jadilah sebuah film. Dalam pembuatannya, dokumenter memiliki beragam sumber materi yang dapat melengkapi cerita atau subjek yang diangkat sehingga terlihat se-'riil' mungkin. Contohnya seperti hasil wawancara, potongan rekaman beberapa peristiwa, suara yang cocok untuk digunakan termasuk efek suara dan musik, dan dokumen-dokumen pendukung lainnya (Branston & Stafford, 2010, p. 360).

Karena sejatinya, dokumenter terlihat realistis karena dua area ini kerap muncul yaitu:

- Mengangkat subjek kontroversial sebagai topik film dokumenternya dan;
- Menggunakan gaya rekam kamera *handheld*, dimana akan ada efek getaran natural seperti orang yang berlari sambil merekam sesuatu. Kamera menjadi *point-of-view* sang pembuat film yang

terlihat terlibat langsung dalam kejadian. Diasumsikan teknik ini menambah autentisitas suatu rekaman berita atau dokumenter.

Bruzzi menjelaskan bahwa "khalayak harus bisa menerima kenyataan bahwa dokumenter "tidak akan bisa secara penuh menggambarkan kenyataan di dunia" (dikutip dalam Branston & Stafford, 2010, p. 365). Karena dokumenter dipercaya sebagai tindakan performatif yang kebenarannya terjadi hanya pada saat syuting berlangsung. Walau dalam pembuatannya tak seratus persen realistis sesuai dunia nyata, tetap saja dokumenter menampilkan cerita yang benar terjadi di dunia nyata, dengan pendekatan *truth storytelling* seputar subjek tanpa menunjukkan batasan antara kamera dan subjek tersebut.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan film dokumenter sebagai media massa yang pesannya akan ditafsirkan oleh informan pilihan.

2.2.2 Transgender

"Transgender" adalah seseorang yang secara permanen mengubah identitas gender sosial melalui presentasi publik tentang diri sendiri, tanpa bantuan untuk transformasi jenis kelamin, berbeda dengan istilah "*transvestite*"; seseorang yang secara bertahap merubah gaya pakaiannya seperti gaya berpakaian jenis kelamin yang berbeda dengan dirinya; dan seorang "transeksual"; seseorang yang secara permanen mengubah alat kelamin untuk mengklaim

jenis kelamin yang berbeda dari yang ia terima sejak lahir (Stryker, 2006, p. 4).

Menurut Siebler (Dines & Humez, 2015, p.133) transgender adalah mereka yang berada di perbatasan antara komunitas dan identitas. Mereka bisa saja terlahir intersex, bisa saja terlahir normal dengan jenis kelamin lelaki atau perempuan. Dulu, banyak transgender yang berkontemplasi untuk melakukan operasi pembedahan hormon agar bisa masuk ke dalam jenis kelamin yang ditentukan secara universal yaitu lelaki atau perempuan.

Namun, kini para transgender menganggap perbaikan hormon tersebut hanyalah sebuah alasan agar diterima di masyarakat heteronormatif. Berdasarkan pernyataan dari Kitzinger, Nielsen, Walden, & Kunkel, heteronormatif adalah sebuah asumsi ketika heteroseksual menjadi norma yang kemudian menghasilkan tekanan sosial untuk memenuhi dan menyesuaikan diri dengan peran heteroseksual (hidup sebagai wanita atau pria). Asumsi ini juga mengarahkan individu untuk memahami diri mereka sendiri dan dunia sosial mereka dengan cara tertentu (dikutip dalam Habarth, 2008, p. 2).

Transgender memperjuangkan kedudukannya dengan percaya bahwa gender tidak terbatas hanya dengan dua, tapi bisa saja diantara dua gender atau bahkan ada lebih dari dua gender di dunia. Maka dari itu, banyak dari transgender yang menolak disebut sebagai

transeksual, karena transgender hanya menentang dan melawan dua gender normatif (pria dan wanita), dan banyak dari mereka yang tidak ingin melakukan perubahan hormon (Dines & Humez, 2015, p.133).

Transgender menjadi sebutan yang mempayungi para *transvestite* dan transeksual karena dinilai lebih mengedepankan hal jenis kelamin sebagai identitas, bukanlah preferensi seksual. Seperti contohnya pada tahun 1983, Stuart (Ekins & King, 2006, p. 14) lebih memilih istilah "transgender" karena menurutnya 'Kata transeksual agak menyesatkan, karena ada kata seksual didalamnya. Mungkin, kata "transgender" akan menjadi istilah yang lebih cocok.' Stuart juga mengatakan bahwa 'kondisi gender sangat berbeda dari kondisi seksual atau preferensi seksual', Penggunaan 'transgender' sebagai istilah lain untuk 'transseksual' disukai oleh beberapa orang setelah istilah transgender kini semakin dikenal.

Berbeda dengan gay dan lesbian, transgender lebih rentan pada diskriminasi karena penampilan mereka terlihat jelas berbeda. Sedangkan gay dan lesbian masuk dalam kategori preferensi seksual dan mereka masih bisa menyembunyikan hal tersebut di publik. Tak jarang orang-orang transgender yang memiliki akses internet kini lebih mencari informasi seputar diri dan lainnya lewat internet. Karena bisa dibilang bahwa transgender merupakan minoritas dalam kaum minoritas di masyarakat dalam hal ini minoritas dalam grup

LGBT (Lesbian Gay Bisexual Transgender). Mereka lebih rentan juga terhadap kekerasan dari lingkungan masyarakat hetero (Dines & Humez, 2015, p.134).

Berikut perbedaan antara Lesbian, Gay, Bisexual, dan Transgender menurut UC Davis:

Tabel 2.2 Perbedaan LGBT

	Lesbian	Gay	Bisexual	Transgender
Orientasi Seksual	√	√	√	X
Identitas Gender	X	X	X	√
	Wanita yang orientasi seksual dan afektif utamanya adalah terhadap orang dengan jenis kelamin yang sama; menyukai sesama wanita.	Orientasi seksual dan afektif terhadap orang-orang dengan jenis kelamin yang sama. Sebutan gay lebih condong dipakai untuk pria yang menyukai sesama pria.	Seseorang yang orientasi seksual dan afektif utamanya adalah terhadap orang-orang dari jenis kelamin yang sama dan lainnya, atau terhadap orang-orang tanpa memandang jenis kelamin mereka.	Berbagai macam identitas dan pengalaman orang-orang yang identitas dan / atau ekspresi gendernya berbeda dari jenis kelamin yang mereka punya saat lahir. Tidak semua orang trans menjalani transisi medis (operasi atau hormon).

Sumber: <https://lgbtqia.ucdavis.edu/educated/glossary.html>

2.2.2.1 Transgender di Indonesia

Konsep transgender sebenarnya sudah melekat erat dengan budaya Indonesia sejak lama. Hal ini ditunjukkan dari beberapa

budaya lokal di Indonesia yang memiliki sebutan tersendiri akan transgender dalam beberapa bahasa daerah, contohnya istilah *calabai* yang dipakai oleh orang Bugis, Makassar (Arus Pelangi, 2017, p. x). Fenomena transgender ini juga sudah sering dibahas dan diteliti dalam ranah kajian gender dan seksualitas. Dalam beberapa kajian tersebut, transgender bahkan diperjelas sebagai sebutan “seks ketiga” (*the third sex*) (Ida, 2010, p. 222). Namun, transgender justru menjadi minoritas dan seringkali mengalami tindakan diskriminatif dalam lingkup keluarga, lingkungan, serta negara.

Istilah transgender sendiri masih sangat jarang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk mendefinisikan mereka yang memiliki identitas gender yang berlawanan dari gender aslinya. Transgender sendiri sebenarnya meliputi perubahan *male to female* dan *female to male*, tetapi orang Indonesia lebih familiar dengan laki-laki dengan dandanan perempuan alias waria (wanita-pria). Bahkan, masyarakat Indonesia lebih awam dengan sebutan banci atau bencong untuk memanggil waria. Waria di Indonesia jauh lebih dikenal daripada orang-orang gay, lesbian, atau biseksual karena seringkali orientasi atau perilaku seksual yang tidak sesuai dianggap sebagai ekspresi atau identitas gender yang *non-conforming* (Oetomo, dkk, 2014, p. 16).

Kelompok transgender di Indonesia masih kerap mendapat kesulitan dalam menjalani kesehariannya. Hal ini dikarenakan hukum Indonesia hanya menekankan gender dalam dua kategori saja yaitu pria dan wanita. Pernyataan akan dua gender yang diakui ini diperjelas dalam Undang Undang Perkawinan (No. 1/1974) dan UU Administrasi Kependudukan terkait kartu identitas (No. 23/2006). Penentuan ini tentu membuat kaum transgender menjadi kesulitan karena perbedaan antara gender yang mereka sebutkan dan penampilan mereka dapat menyebabkan masalah dalam mengakses layanan, perjalanan, izin usaha, dan sejenisnya (Oetomo, dkk, 2014, p. 21).

Oetomo dkk (2014, p. 24) juga menyatakan bahwa waria rentan terhadap diskriminasi terutama di bagian pencarian kerja. Tidak ada undang-undang anti-diskriminasi atas dasar orientasi seksual dan identitas gender. Secara teoritis ada jaminan perlindungan terhadap praktik-praktik diskriminatif berdasarkan landasan apa pun dalam Konstitusi dan UU Hak Asasi Manusia (No. 39/1999). Demikian pula, UU Ketenagakerjaan (No. 13/2003) melarang diskriminasi dalam pekerjaan. Namun, ini sedikit diketahui di komunitas LGBT, dan belum digunakan di pengadilan dalam kasus untuk menentang diskriminasi terhadap LGBT.

Waria juga semakin dipandang negatif oleh masyarakat Indonesia karena sebagian besar waria selalu dikaitkan dengan bekerja sebagai pekerja seks komersil (PSK) (Koeswinarno, 2004, p. 95). Tak sampai disitu, diskriminasi transgender juga berlanjut ke konten media. Bisa dibilang bahwa media di Indonesia juga turut memberikan andil dalam pembentukan citra dan stereotip transgender di masyarakat. Contohnya adalah di acara televisi seperti Yuk Kita Sahur, dimana konsep transgender atau waria sering digunakan sebagai pelengkap cerita ataupun bahan lelucon (Felix, 2012, p. 7). Hal ini merujuk kepada penjelasan Ida bahwa media massa juga melakukan penindasan terhadap waria dengan penggambaran karakter waria yang biasanya tidak menguntungkan sebagai individu, maupun dalam masyarakat (dikutip dalam Masayu, 2017, p. 18).

Selain media siar, pemberitaan mengenai isu transgender atau kaum minoritas lainnya juga lebih condong ke arah negatif dan dirugikan. Karena pada dasarnya, media juga lebih menampilkan ideologi dominan yang ada di masyarakat (Aunul, 2018, p. 4). Maka dari itu, kaum minoritas yang merupakan bagian dari ideologi minor juga semakin terpinggirkan dan dipandang sebelah mata.

2.2.2.2 Media dan Transgender di Indonesia

Isu transgender tetap tidak luput dari liputan media. Di media online sendiri masih kerap bermunculan pemberitaan terkait transgender dan terbilang porsi pemberitaannya kian meningkat setelah maraknya kasus pedangdut Lucinta Luna. Berdasarkan riset Alinea, pemberitaan mengenai transgender dari kurun Januari hingga Maret 2018, dari segi judul paling besar terbilang netral (46.98%), selebihnya lebih condong ke negatif (35.7%) dan paling kecil yang mengarah ke positif (17.32%). Tercatat setidaknya ada 62 media online yang memberitakan transgender, paling besar berasal dari grup Tribun News (Tobing, 2018, para. 8-9).

Selain media berita, isu transgender juga masih menjadi perbincangan di media sosial dan sentimen masyarakat masih terbilang di posisi negatif. Seperti di media sosial Facebook, di mana warganet memandang transgender sebagai sesuatu hal yang negatif yaitu sebesar 66,67%, sedangkan posisi netral hanya 33,33% (Tobing, 2018, para. 10). Riset tersebut menunjukkan bahwa fenomena representasi transgender di media Indonesia masih termarginalisasi, bahkan cenderung dipandang negatif seperti dianggap sebagai penyakit atau penyimpangan kodrat.

Ketidakramahan media akan transgender tak hanya dari media online saja tetapi juga media siar seperti TV dan Radio. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang tayangan yang mengampanyekan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) karena melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) KPI tahun 2012. Larangan tersebut dikeluarkan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak dan remaja yang rentan menduplikasi perilaku menyimpang LGBT. Dari asumsi tersebutlah kini TV dan Radio tidak diperbolehkan untuk memberikan ruang bagi LGBT dan menunjukkan hal apapun terkait perilaku LGBT itu adalah sesuatu yang lumrah (KPI, 2016, para. 2). Hal ini berlaku terhadap semua jenis acara yang ada di media siar, seperti hiburan maupun jurnalistik.

Berikut adalah edaran KPI yang dirilis pada 18 Februari 2016 melalui website resmi mereka dengan tajuk “Edaran Kepada Seluruh Lembaga Penyiaran Untuk Program yang mengangkat tema Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)”:

U
M
M
N

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Gambar 2.1 Edaran KPI terkait Penyiaran Konten LGBT

Tgl Surat	18 Februari 2016
No. Surat	184/K/KPI/02/16
Status	Edaran
Stasiun TV	Seluruh Lembaga Penyiaran
Program Siaran	Program yang mengangkat tema Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT)
Deskripsi Pelanggaran	<p>Komis Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) berdasarkan wewenang, tugas dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), berwenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012. Berdasarkan pemantauan KPI Pusat, banyak stasiun televisi menyiarkan program yang mengangkat tema Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), baik dalam program jurnalistik maupun non jurnalistik.</p> <p>Lembaga penyiaran diminta untuk tidak memberikan ruang yang menampilkan praktik, perilaku dan promosi LGBT. Promosi yang dimaksud dapat dilihat dari aspek judul/tema, narasi, pembawa acara, keberimbangan narasumber dan durasi dalam menyampaikan pendapat dan kesimpulan yang memuat pesan bahwa LGBT sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan.</p> <p>Perlu kami sampaikan bahwa arah dan tujuan penyiaran sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 (UU Penyiaran), adalah untuk membentuk watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa. Kami berharap media dapat berperan dalam melakukan kontrol sosial atas fenomena sosial yang menyimpang di masyarakat.</p> <p>Ketentuan di atas berlaku bagi seluruh program siaran. Demikian surat edaran KPI Pusat ini untuk dipatuhi. Terima kasih.</p>

Sumber: <http://www.kpi.go.id/>

Media yang dapat mengulas lebih dalam mengenai isu transgender yang ada di Indonesia lebih kepada media alternatif seperti media online Arus Pelangi dan film dokumenter (contoh: Renita Renita, dll) yang hanya ditayangkan sebatas dalam ruang edukasi, film festival, maupun ruang diskusi saja.

2.2.3 Teori Kajian Budaya

Penelitian ini menggunakan teori kajian budaya untuk mengkaji fenomena yang diteliti yaitu pemaknaan khalayak terhadap konsep transgender yang dikodekan lewat suatu teks media, dalam hal ini, lewat media film dokumenter. Pada dasarnya budaya tidak bisa dipisahkan dari bagaimana manusia memaknai segala hal yang ada di sekitarnya, termasuk memaknai pesan dari media. Budaya dapat memengaruhi dan membentuk cara pandang dan berpikir seseorang dalam memaknai segala hal yang ada di kehidupannya. Pesan yang dikodekan lewat teks media tentu juga tidak terlepas dari budaya dari si pembuat pesan.

Menurut Ida (2014), teori kajian budaya dimunculkan pertama kali oleh para akademisi dan peneliti dari *Birmingham Centre for Contemporary Cultural Studies*, yang terus mengembangkan berbagai macam metode kritis untuk menganalisis, menginterpretasi, dan mengkritik berbagai macam bentuk media. Mulai dari 1960, para akademisi dan peneliti Birmingham memfokuskan perkembangan kajian budaya pada representasi dan ideologi dari kelas sosial, ras, etnis, gender, dan kebangsaan dalam teks budaya, termasuk budaya media (Ida, 2014, p. 1).

Kajian budaya dan studi mengenai media membicarakan tentang sebuah fenomena budaya yang refleksif (berbeda dari natural), dalam artian kita menggunakan media untuk mendiskusikan media dan

membahas subjek yang mengalami perubahan yang cepat. Kita mempelajari media dan kajian budaya untuk membuat perubahan pada dunia dan juga diri kita sendiri dalam memandang dunia, juga untuk membawa dampak positif pada kehidupan. Media dan kajian budaya bisa disebut sebagai subjek transformasional, dimana mereka masuk kedalam subjek yang politis, sosial, dan humanis (Stokes, 2013, p. 47).

Kajian budaya juga mempelajari bagaimana budaya media menunjukkan nilai-nilai dominan, ideologi politik, dan perkembangan sosial baru di era yang sedang berlangsung ini. Untuk kajian budaya sendiri, konsep dari ideologi sangatlah penting karena ideologi dominan berfungsi untuk membangun hubungan sosial antara dominasi dan subordinasi. Ideologi itu sendiri dapat memunculkan ketidakseimbangan dan ketidaksamaan dalam tingkatan masyarakat, karena hal inilah kajian budaya juga memfokuskan pada bagaimana kelompok atau individu subkultur menolak ideologi dominan dari budaya dan identitas yang dihasilkan media, kemudian dari penolakan tersebut mereka dapat menciptakan gaya dan identitas mereka sendiri (Dines & Humez, 2015, p.8-9).

Selain itu, kajian budaya menjunjung kegiatan multikulturalis yang menunjukkan bagaimana budaya menghasilkan bentuk-bentuk rasisme, sexisme, dan bias terhadap kaum minoritas yang ada di masyarakat (Dines & Humez, 2015, p. 9). Pendekatan kajian budaya

dipercaya dapat menunjukkan bagaimana media berusaha memanipulasi dan mendoktrin masyarakat dengan ideologi dominan yang ditampilkan tetapi dapat ditolak oleh masyarakat yang mampu untuk menginterpretasi pesan yang disampaikan dengan pengartiannya sendiri.

Kajian budaya memiliki tiga komponen penting dalam penelitiannya yaitu menganalisa keterkaitan budaya dengan ekonomi dan politik, teks budaya, dan resepsi audiens terhadap teks budaya tersebut.

2.2.4 Resepsi Audiens

Teori resepsi audiens adalah teori yang berdasar pada khalayak (audiens), memfokuskan pada bagaimana khalayak dengan latar belakang berbeda-beda menafsirkan dan memaknai pesan yang disampaikan dari berbagai konten media. Pemahaman ini juga menekankan bahwa audiens/khalayak tidak sepenuhnya menerima pesan dari media secara pasif dan terpengaruh secara langsung. Maka dari itu, khalayak media massa seringkali disebut sebagai khalayak aktif yang artinya khalayak kini mampu menginterpretasikan pesan dan memaknainya dengan cara mereka sendiri, mengatur pesan apa saja yang ingin diterima maupun tidak (Lindlof dalam McQuail, 1997, p. 19).

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Stuart Hall untuk melawan tradisi kritik film Marxis yang beranggapan bahwa film

populer memiliki karakteristik menipu dan hanya mendukung status quo. Hall berpendapat bahwa seorang peneliti kajian budaya harus menempatkan perhatiannya pada:

- 1) Analisis atas konteks sosial dan politik dalam produksi konten (pengodesan/*encode*).
- 2) Konsumsi konten media (penafsiran/*decode*) (Baran & Davis, 2010, p. 303).

Analisis resepsi audiens merupakan metode penelitian dari ranah kajian budaya, yang menekankan pada penggunaan media sebagai refleksi dari konteks sosial dan juga sebagai proses pemberian makna pada produk dan pengalaman budaya tertentu. Hal ini mengacu pada model komunikasi “*encoding-decoding*”. Model komunikasi yang dikemukakan Stuart Hall ini pada dasarnya menyatakan bahwa makna dikodekan oleh pengirim (*sender*) dan ditafsirkan oleh penerima (*receiver*). Namun, makna yang dikodekan ini dapat diterjemahkan untuk mengartikan sesuatu yang lain. Artinya adalah, pengirim mengkodekan makna dalam pesan mereka sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan mereka yang kemudian pesan tersebut akan diterjemahkan oleh penerima sesuai dengan ideologi sang penerima itu sendiri (Stokes, 2013, p. 173). Alhasil, makna yang mereka dapatkan bisa jadi berbeda dari makna awal sang pengirim.

Salah satu ciri utama dari penelitian resepsi audiens ada pada isi teks media. Meminjam teori semiotika, Hall (Baran & Davis, 2010, p.

304) berpendapat bahwa setiap konten media bisa disebut teks karena terdiri dari berbagai lambang; untuk membaca suatu teks dan menafsirkannya, kita harus memahami lambang-lambang tersebut. Karena pada dasarnya, beberapa teks media bersifat polisemi, yaitu adanya ambiguitas dan dapat diartikan ke arti yang berbeda dengan cara-cara yang berbeda pula.

Dalam konteks penafsiran (*decoding*) makna, Stuart Hall (Branston & Stafford, 2010, p. 392) membagi khalayak ke dalam tiga posisi yaitu:

a. Posisi Dominan

Dominan atau hegemonik ini adalah posisi dimana khalayak memahami pemaknaan dominan dari pembuat pesan dan menyetujui serta mendukung pemaknaan dominan tersebut. Hal ini dapat terjadi apabila sebuah konten tersebut terbilang populer dan mampu memengaruhi khalayak secara langsung. Alasan lainnya adalah ketika ideologi dan budaya khalayak ternyata sama/sejalan dengan milik si pembuat pesan.

b. Posisi Negosiasi

Posisi ketika khalayak menangkap makna dominan dan membuat sebuah penafsiran alternatif terhadap makna yang disampaikan. Bisa saja secara sebagian, khalayak menyetujui makna dominan tetapi sebagian pesan ditafsirkan berbeda

menciptakan makna baru yang bisa saja melengkap makna dominan tersebut atau kebalikannya.

c. Posisi Oposisi

Posisi ketika khalayak menangkap pemaknaan dominan dari sebuah konten media kemudian menolak untuk menerima pemaknaan tersebut karena tidak sejalan dengan ideologi dan budaya khalayak. Mereka kemudian menafsirkan makna baru yang berlawanan dari pemaknaan dominan.

Terdapat delapan faktor yang memengaruhi pandangan khalayak dalam memahami dan memaknai konten media (Mcquail, 1997, p. 76-78) . Delapan faktor ini antara lain:

1. Latar belakang sosial dan lingkungan pergaulan khalayak yang meliputi kelas sosial, pendidikan, kepercayaan, budaya, politik, lingkungan budaya dan wilayah tinggal.
2. Atribut personal khalayak yang meliputi umur, gender, posisi keluarga, pekerjaan atau pendidikan, tingkat pendapatan, dan/atau gaya hidup jika relevan.
3. Kebutuhan akan berhubungan dengan media yang dipengaruhi oleh keadaan serta latar belakang personal.
4. Selera personal khalayak dan minatnya terhadap genre, format dan konten tertentu.

5. Kebiasaan khalayak dalam penggunaan media di waktu luang dan pada waktu tertentu. Faktor yang memengaruhi ini antara lain adalah potensi ekonomi.
6. Kesadaran khalayak terhadap pilihan yang tersedia dan ragam informasi yang dimiliki.
7. Konteks tertentu dari penggunaan yang variatif tergantung medium apa yang digunakan. Biasanya merujuk pada lingkungan sosial dan lokasi penggunaan.
8. Kesempatan yang diperoleh khalayak dalam bermedia.

Penelitian berbasis khalayak seperti resepsi audiens ini tentunya penting dilakukan. Pasalnya, yang menjadi inti dari penelitian khalayak adalah pengalaman dari manusia. Melakukan penelitian mengenai khalayak untuk media dan budaya membuat kita dapat memahami dan menelusuri lebih dalam akan kegunaan media. Kita dapat mengetahui dampak, pengaruh, dan efek dari media lewat bagaimana teks media diterima khalayak. Selain itu, penelitian berbasis khalayak ini juga bisa menunjukkan apa yang disukai dan tidak disukai khalayak, dan apa yang bisa mereka dapatkan dari membaca teks media tersebut (Stokes, 2013, p. 174).

2.3 Alur Pikir Penelitian

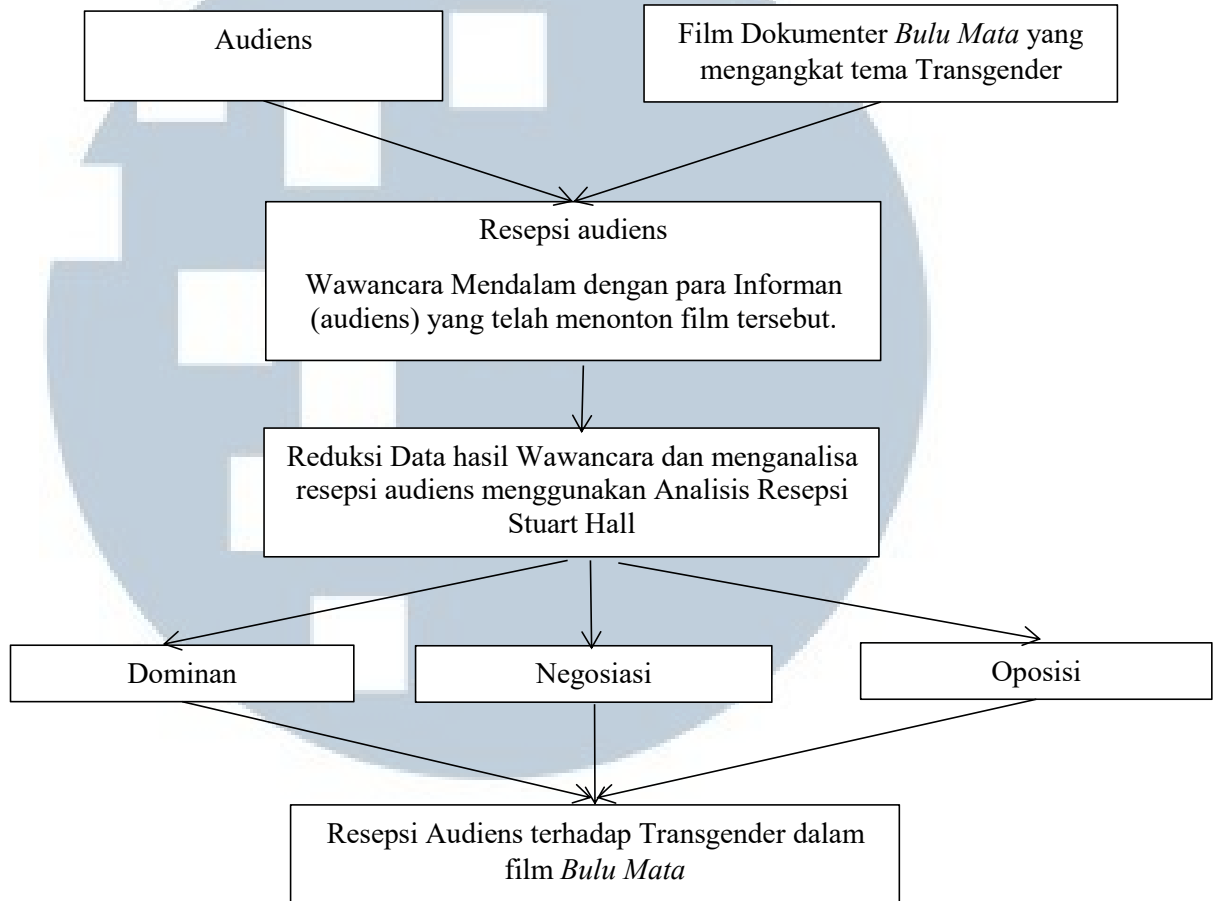
Penelitian ini akan menggunakan film dokumenter berjudul *Bulu Mata* (2016) sebagai medium pesan yang akan dipertontonkan pada khalayak. Khalayak disini adalah informan dengan jumlah yang dibutuhkan serta yang

memenuhi kategori yang ditentukan peneliti. Film dokumenter *Bulu Mata* ini sendiri mengangkat tema yang cukup sensitif terkait gender dan minoritas yaitu tentang kehidupan sekelompok transgender di Indonesia, spesifiknya Provinsi Aceh. Para informan yang telah menonton film tersebut akan diwawancara oleh peneliti menggunakan teknik wawancara mendalam. Sehingga peneliti dapat mengetahui lebih rinci mengenai pemaknaan yang dilakukan oleh setiap informan.

Jawaban dari informan kemudian akan dikelompokkan sesuai kategori yang sudah ditentukan penulis maupun yang muncul dari proses wawancara itu sendiri. Peneliti kemudian akan menggunakan metode analisis resepsi audiens dari Stuart Hall yang meliputi model komunikasi *encoding-decoding*. Hasil penafsiran (*decoding*) dari setiap informan mengenai transgender akan dianalisis dan para informan akan diposisikan ke dalam posisi dominan, oposisi, atau negosiasi, atau beberapa dari mereka berada di posisi yang berbeda-beda. Dari posisi penafsiran informan tersebut, peneliti kemudian bisa menarik kesimpulan apakah informan dapat menerima pesan sesuai dengan maksud si pembuat pesan atau tidak, dan meninjau apakah film dokumenter *Bulu Mata* terbilang efektif dalam menyampaikan pesan sang pembuat film.

U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A

Bagan 2.1 Alur Penelitian



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA